

# **RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024**



**DINAS BINA MARGA DAN  
SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKASI**

## KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Rencana Akhir Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi tahun 2024.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2024, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang sejahtera dan lebih baik.

Bekasi,

2023

**KEPALA DINAS BINA MARGA  
DAN SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKASI**



**Drs. H. Abdullah, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630718 199601 1 001

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Kota Bekasi
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas BMSDA Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Tabel 4.1	Tabel Usulan Rencana Program dan Kegiatan Dinas BMSDA Tahun 2024

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Instansi Pemerintah merupakan salah satu faktor yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka mencapai *good governance* yang dimaksud, instansi pemerintah harus secara kontinyu melakukan evaluasi programnya yang meliputi evaluasi untuk peningkatan kualitas struktur, evaluasi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan tanggap terhadap perubahan serta antisipatif terhadap masa yang akan datang.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan *Public Service* (Pelayanan Masyarakat) dari segi infrastruktur jalan, pengendalian banjir, penataan dan pemeliharaan taman, pengelolaan reklame, serta pelayanan Penerangan Jalan Umum. Pemerintahan yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Secara substansial, rencana kerja penanganan sektor bina marga dan sumber daya air di Kota Bekasi harus berprinsip pada *Sustainability Development* atau pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan penanganan sektor bina marga dan sumber daya air yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dengan demikian perencanaan kerja ini merupakan suatu rencana induk secara komprehensif yang menggambarkan bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang akan timbul.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki kewenangan yang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat Kota Bekasi, kecuali

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

urusan-urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan pada era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih ditekankan pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen yang berkepentingan di Kota Bekasi (masyarakat atau publik, DPRD, departemen atau instansi, Lembaga swadaya masyarakat, dsb) akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Tujuan ketiga Pembangunan Kota Bekasi periode 2024 - 2026 yaitu Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Rencana kerja tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki dengan mempertimbangkan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategi. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi ke arah yang diinginkan.

Penyusunan Rencana kerja wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-tersebut untuk memajukan Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (law enforcement) dan diterapkannya prinsip-prinsip good governance dilingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi, kehidupan sosial, perekonomian masyarakat dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram, damai dan sejahtera.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing kegiatan. Serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renja DBMSDA Kota Bekasi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan *Strategic Management System* dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu acuan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah.

Dalam penyusunannya, Renja DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara RI nomor 4700);
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta sarana dan prasarana umum;

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011 – 2031;
- q. Keputusan Walikota Nomor 060/Kep.355-ORG/XI/2008 tentang Pembakuan Nomenklatur, Literatur dan Istilah Bahasa Inggris Terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- r. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi( Lembaran Daerah Kota BekasiTahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
- t. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
  - u. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026;
  - v. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
  - w. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Dokumen Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan Kebinamargaan dan Tata Air yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi adalah:

- a. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
- b. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kebinamargaan dan Tata Air untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- c. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kebinamargaan dan Tata Air.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Akhir Rancangan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2024 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2024, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022**

Bab II menjelaskan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Disamping itu, pada Bab II diuraikan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan Akhir RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Bab III menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2024, serta keselarasan program kerja dengan visi misi Walikota.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab IV menjelaskan program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024 -2026 dan Usulan kegiatan Tahun 2024 yang bersifat urgent dan prioritas dalam penganggaran.

#### **BAB V PENUTUP**

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Bab V memuat kesimpulan dari rencana kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan rekomendasi rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

### 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tahun 2024 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi periode 2024 - 2026. Adapun penyusunan Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki; dan
- Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tahun 2024 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2024; dan

PARAF KOORDINASI:	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada tahun 2022, capaian indikator kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tidak semua tercapai sesuai dengan target indikator kinerja program RPJMD Kota Bekasi yaitu:

1. Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi baik, target pada tahun 2022 yaitu 0,74 poin dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 0.97 poin (127%)
2. Indikator Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40km/jam), target pada tahun 2022 yaitu 97,20% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 101% (103,91%)
3. Indikator Persentase Pembangunan Jembatan Baru, target pada tahun 2022 yaitu 53,09% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 58% (109,25%)
4. Indikator Persentase Pemeliharaan Jembatan, target pada tahun 2022 yaitu 92,7% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 95% (102,48%)
5. Indikator Persentase Jalan yang memiliki Trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m), target pada tahun 2022 yaitu 20,08% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 19% (94,62%)
6. Indikator Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat, target pada tahun 2022 yaitu 67,92% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 112,18% (165%)
7. Indikator Persentase Pembangunan Polder, target pada tahun 2022 yaitu 71,37% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 22% (31%)
8. Indikator Presentase Pemeliharaan Polder, target pada tahun 2022 yaitu 6,24% dan dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 17% (276%)
9. Indikator Penataan dan Pemeliharaan Reklame, target pada tahun 2022 yaitu 8 Buah dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 8 Buah (100%)

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

10. Indikator Peningkatan Pembangunan PJU Baru, target pada tahun 2022 yaitu 53,3% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 54,94% (103%)
11. Indikator Jumlah Pemeliharaan PJU, target pada tahun 2022 yaitu 11250 titik dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 11250 titik (100%)
12. Indikator Presentase Pembangunan Taman Baru, target pada tahun 2022 yaitu 18,82% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 22,51% (120%)
13. Indikator Presentase Presentase Pemeliharaan Taman, target pada tahun 2022 yaitu 78,65% dan capaian kinerja Dinas BMSDA yaitu 107,72% (137%)

Pada Tahun 2022 Jumlah Belanja Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebesar Rp. 523.772.981.999,00. Pada Perubahan APBD Tahun 2022 mengalami perubahan alokasi dana menjadi sebesar Rp. 738.299.923.061,00. Dari Jumlah belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp. 674.014.871.053,00 dengan realisasi fisik rata – rata seluruh program dan kegiatan mencapai 98,55% dan realisasi keuangan sebesar 91,29%.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)\*  
Kota Bekasi**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja TA 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1 3 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1 3 01 2 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renja, SAKIP, Renja Perubahan, LKIP, LPPD)	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	5 Laporan	100%

**PARAF KOORDINASI:**

Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	





1	3	02	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	975 Unit	975 Unit	975 Unit	975 Unit	100%	975 Unit	975 Unit	100%
							Jumlah Penggandaan	150345 Lembar	150345 Lembar	150345 Lembar	150345 Lembar		150345 Lembar	150345 Lembar	
1	3	02	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3152 Buku/Eksemplar	3152 Buku/Eksemplar	3152 Buku/Eksemplar	3152 Buku/Eksemplar	100%	3152 Buku/Eksemplar	3152 Buku/Eksemplar	100%
1	3	02	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	360 Kali	352 Kali	352 Kali	352 Kali	100%	360 Kali	360 Kali	100%
1	3	02	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan arsip yang ditata/dikelola	100 Box	491 Box	491 Box	491 Box	100%	100 Box	100 Box	100%
1	3	02	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	3	02	2	07	04	Pengadaan Alat Besar									
1	3	02	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								
1	3	02	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan								
1	3	02	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	3	02	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening teleppn, internet, air dan listrik	25 Rekening	324 Rekening/Tahun	324 Rekening/Tahun	324 Rekening/Tahun	100%	25 Rekening	25 Rekening	100%

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	02	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga administrasi	2232 orang/Bulan	4176 orang/Bulan	4176 orang/Bulan	4176 orang/Bulan	100%	2232 orang/Bulan	2232 orang/Bulan	100%
						jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	1152 Orang/Bulan		1152 Orang/Bulan	1152 Orang/Bulan					
1	3	02	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	3	02	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan jabatan	86 Unit	86 Unit	86 Unit	86 Unit	100%	86 Unit	86 Unit	100%
1	3	02	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional								
1	3	02	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor	1150 m2	136 Unit	1150 m2	1150 m2	100%	1150 m2	1150 m2	100%
1	3	02	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	luas gedung kantor	160 Unit	1120 m2	160 Unit	160 Unit	100%	160 Unit	160 Unit	100%
1	3	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)									

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
1	3	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	3	02	2	01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	2 km	2 km	2 km	2 km	100%	2 km	2 km	100%
1	3	02	2	01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	3	02	2	01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Pembangunan Polder/Kolam Retensi	150.000 m3	0 m3	150.000 m3	150.000 m3	100%	150.000 m3	150.000 m3	100%
1	3	02	2	01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	0 km	1 km	1 km	1 km	100%	0 km	0 km	100%
1	3	02	2	01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/ Kolam Retensi	Volume Pemeliharaan Polder	33793 m3	0 m3	33793 m3	0 m3	0%	33793 m3	33793 m3	100%
1	3	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE									

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	06	2	01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota											
1	3	06	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%		
1	3	06	2	01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	7 km	7,67 km	7 km	13,74 km	100%	7 km	7 km	100%		
1	3	06	2	01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	20 km	32,55 km	20 km	44,87 km	100%	20 km	20 km	100%		
1	3	06	2	01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Panjang Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	14 km		14 km		100%	14 km	14 km	100%		
1	3	06	2	01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Terlaksananya Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 paket	2 paket	100%		
1	3	06	2	01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Panjang Drainase terpelihara	4 km	4 km	4 km	4 km	100%	4 km	4 km	100%		
1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN											
1	03	07	2	01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota											

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	03	07	2	01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik PJU terbangun	1000 titik	1000 titik	1000 titik	1000 titik	100%	1000 titik	1000 titik	100%
1	03	07	2	01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik PJU Terpelihara	11251 titik	11251 titik	11251 titik	11251 titik	100%	11251 titik	11251 titik	100%
1	3	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN									
1	3	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota									
1	3	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
1	3	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah terlaksananya survey kondisi jalan/jembatan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	3	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Jumlah Pembangunan Jalan di Kota Bekasi	3 km	2,94 km	3 km	2,17 km	97%	3 km	3 km	100%
1	3	10	2	01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jumlah Pelebaran Jalan Menambah Lajur di Kota Bekasi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	66 km	98,35 km	66 km	417,5 km	100%	66 km	66 km	100%
1	3	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang terpelihara atau rehabilitasi	32 km		32 km	32 km	100%	32 km	32 km	100%
1	3	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang berkala terpelihara	10 km	9,56 km	10 km	11,61 km	100%	10 km	10 km	100%
1	3	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang rutin terpelihara	2 km		2 km	26,23 km	100%	2 km	2 km	100%
1	3	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Pembangunan Jembatan	0,02 km	0,02 km	0,02 km	0,11 km	100%	0,02 km	0,02 km	100%
1	3	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Rehabilitasi Jembatan di Kota Bekasi	0,03 km	0,03 km	0,03 km	0,139 km	100%	0,03 km	0,03 km	100%
1	03	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									
1	03	12	2	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota									
1	03	12	2	04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemeliharaan Panggung Reklame Milik Pemerintah	8 buah	1 buah	8 buah	8 buah	100%	8 buah	8 buah	100%
							Jumlah Penertiban Bangunan Reklame Se-Kota Bekasi	240 hari	240 hari	240 hari	240 hari	100%	240 hari	240 hari	100%
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2	1 1	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										
2	1 1	04	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										
2	1 1	04	2	01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Luas Taman yang Terbangun	6000 m2	6000 m2	6000 m2	6000 m2	100%	6000 m2	6000 m2	100%	
							Jumlah luas taman yang terpelihara di Kota Bekasi Wilayah I dan II	96157 m2	80348 m2	96157 m2	96157 m2	100%	96157 m2	96157 m2	100%	
2	1 1	04	2	01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD**

Analisis kinerja pelayanan PD berupa pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi indikator sasaran pada tahun 2022 yang dapat dilihat terlampir pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



**Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air  
Kota Bekasi**

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	-		A	A	-		BB	A	BB	BB	
			Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
			Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik	-		2,35%	2,35%	-	-	9,96%	2,35%		-	
			Persentase Pembangunan Jalan Baru	95,65%	96,54%	-	-	93,46%	96,54%			

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Persentase Pemeliharaan Jalan Arteri + Kolektor	97,09%	98,54%	-	-	96,95%	98,54%			
			Persentase Pemeliharaan Jalan Lingkungan	72,65%	73,32%	-	-	79,28%	73,32%			
3	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	-		0,76%	0,06%	-	-	1,05%	0,06%		-	
			Persentase Pembangunan Jembatan Baru	53,09%	53,24%	-	-	58,00%	53,24%			
			Persentase Pemeliharaan Jembatan	92,70%	93,38%	-	-	95,00%	93,38%			
4	Persentase Drainase dalam kondisi baik	-		0,32%	0,32%	-	-	0,40%	0,32%		-	
			Persentase Pembangunan Drainase Jalan	60,24%	60,32%	-	-	60,31%	60,32%			
			Persentase Pemeliharaan Drainase Jalan	67,79%	68,52%	-	-	69,61%	68,52%			
5	Persentase Polder dalam kondisi baik	-		2,24%	2,24%	-	-	0,48%	2,24%		-	
			Persentase Pembangunan Polder	71,37%	74,29%	-	-	22,00%	74,29%			
			Persentase Pemeliharaan Polder	6,24%	7,34%	-	-	17,20%	7,34%			
6	Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	-		1,67%	1,67%	-	-	0,39%	1,67%		-	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Persentase Pembangunan Pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difabel dan lansia	20,08%	20,48%	-	-	19,00%	20,48%			
			Persentase Pemeliharaan Pedestrian	83,05%	89,89%	-	-	80,00%	89,89%			
7	Persentase PJU dalam kondisi baik	-		1,61%	1,61%	-	-	2,42%	1,61%		-	
			Persentase Peningkatan Pembangunan PJU Baru	53,30%	54,18%	-	-	54,94%	54,18%			
			Persentase Pemeliharaan PJU	11251 titik	11251 titik	-	-	11250 titik	11251 titik			
8	Persentase Reklame dalam kondisi baik	-		25%	25%	-	-	25,00%	25%		-	
			Persentase Pemeliharaan Reklame	8 buah	8 buah	-	-	8 buah	8 buah			
9	Persentase Taman dalam kondisi baik	-		9,96%	11,78%	-	-	15,25%	11,78%		-	
			Persentase Pembangunan Taman	18,82%	19,60%	-	-	22,51%	19,60%			
			Persentase Pemeliharaan Taman	78,65%	94,13%	-	-	107,72%	94,13%			
10	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi			-	-	77,85%	79,18%	-	-	77,85%	79,18%	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	jalan											
			Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	-	-	0.81	0.83	-	-	0.81	0.83	
			Presentase Jalan Kota dalam kondisi baik (>40km/jam)	-	-	101.21%	105,01%	-	-	101.21%	105,01%	
			Presentase Pembangunan jembatan baru	-	-	64.64%	64.79%	-	-	64.64%	64.79%	
			Presentase Pemeliharaan jembatan	-	-	71.41%	71.93%	-	-	71.41%	71.93%	
			Presentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	-	-	21.01%	21.41%	-	-	21.01%	21.41%	
11	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan			-	-	58,39%	59,48%	-	-	58,39%	59,48%	
			Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	-	-	68.27%	68.57%	-	-	68.27%	68.57%	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

			Presentase Pembangunan Polder	-	-	65.54%	66.12%	-	-	65.54%	66.12%	
			Presentase Pemeliharaan Polder	-	-	7.01%	8.17%	-	-	7.01%	8.17%	
12	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan			-	-	67,81%	69,32%	-	-	67,81%	69,32%	
			Presentase Peningkatan Pembangunan PJU Baru	-	-	55.06%	56.33%	-	-	55.06%	56.33%	
			Presentase Pemeliharaan PJU	-	-	11250 titik	11250 titik	-	-	11250 titik	11250 titik	
			Presentase Pembangunan Taman Baru			22.37%	23.67%			22.37%	23.67%	
			Presentase Pemeliharaan Taman			98.02%	100,00%			98.02%	100,00%	
			Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame	-	-	8 buah	8 buah	-	-	8 buah	8 buah	
13	Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA			-	-	100,00%	100%	-	-	100,00%	100%	
			Presentase pengembangan jasa konstruksi dalam keadaan baik	-	-	100,00%	100%	-	-	100,00%	100%	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI PD DAN CATATAN STRATEGIS**

Berdasarkan deskripsi permasalahan pelayanan PD pada subbab sebelumnya terlihat faktor utama yang mempengaruhi yaitu dari segi geografi dan kondisi sarana dan prasarana PD.

Permasalahan pelayanan PD dari segi kondisi geografis Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Topografi Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan 0 – 2% sehingga sering terjadinya genangan.
- Kota Bekasi dilalui arus pergerakan lalu lintas barang dan jasa dari wilayah timur Pulau Jawa menuju Jakarta baik melalui jalan tol maupun jalan arteri.
- Kebijakan tata ruang nasional yang menetapkan Kota Bekasi sebagai pusat kegiatan wilayah dalam lingkungan Jabotabek yang kegiatan utamanya industri dan pariwisata serta menunjang DKI Jakarta dalam bidang kependudukan dan permukiman menyebabkan arus urbanisasi yang tinggi.
- Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam arah pengembangan menuju barat dan timur sehingga volume lalu lintas menjadi tinggi.
- Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan kegiatan nasional (PKN).
- Kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi dan Propinsi Jawa Barat yang menetapkan kawasan industri skala besar yang mencapai 6000 Ha berdampak terhadap meningkatnya lalu lintas di Kota Bekasi.
- Dibelahnya Kota Bekasi dalam arah barat-timur oleh jalan tol Kalimalang, Jalan Negara Bekasi Karawang, rel kereta api yang dikembangkan dengan double track kereta api
- Sedangkan arah utara-selatan Kota Bekasi dipisahkan oleh Kali Bekasi, Kali Kranji dan beberapa kali sekunder irigasi untuk wilayah Kabupaten Bekasi

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Terdapat 20 sungai/kali yang melewati Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi menjadi area rawan banjir.

Sementara permasalahan pelayanan PD dari segi kondisi sarana dan prasarana DBMSDA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

- Kondisi sumber daya manusia bidang ilmu teknis kurang memadai
- Pelaksanaan tugas fungsional sebagai PPK, PPTK, PELTEK dan Pembantu PELTEK kurang efisien dan efektif.
- Lemahnya pembinaan/ bantuan hukum dalam perkara kegiatan dan administrasi dokumen – dokumen.
- Standar operasional prosedur dalam pelayanan publik belum maksimal diterapkan.
- Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan.

b. Bidang Bina Marga

- Terbatasnya data jaringan dan fungsi jalan dan jembatan.
- Terbatasnya data Rumaja dan Rumija serta operasi penertibannya belum optimal.
- Belum tertibnya nama – nama jalan yang ada di Kota Bekasi.
- Belum optimalnya penanganan pemeliharaan jalan rusak yang sifatnya urgent.
- Penerapan undang – undang lalu lintas belum optimal
- Kurangnya akses poros jalan arteri kota arah barat-timur yang hanya dilayani oleh jalan arteri saja, sehingga arus lalu lintas menumpuk di pusat kota
- Kurangnya akses poros utara-selatan kota yang terhambat jalan tol, Sungai Kalimalang, jalan kereta api yang memerlukan penambahan pelebaran jalan, jembatan dan Fly Over/Under Pass.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

- Terjadinya beban lalu lintas yang cukup tinggi yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ada sehingga meningkatkan tingkat kerusakan jalan.
- Pertambahan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertambahan panjang ruas jalan, sehingga kapasitas jalan yang ada telah terlampaui ( $v/c$  ratio  $>1$ ).
- Banyaknya titik-titik kemacetan pada ruas jalan dan pada persimpangan
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara jalan dan saluran.
- Banyaknya program nasional di Kota Bekasi yang menjadi beban daerah misalnya dampak jalan tol terhadap keberadaan jalan lokal, double track kereta api yang berdampak terhadap kemacetan lalu lintas di pintu perlintasan.
- Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan
- Kurangnya staf ahli

c. Bidang Sumber Daya Air

- Database jaringan saluran/drainase belum Up To Date
- Jaringan Irigasi di Kota Bekasi sudah berubah fungsi dan belum berubah kewenangannya.
- Penangan Banjir dan Pembangunan Situ/Polder belum memadai.
- Terbatasnya dana normalisasi/pemeliharaan saluran drainase akibat cepatnya sedimentasi dan banyaknya sampah di kali atau saluran.
- Terdapat titik-titik banjir yang tersebar di wilayah Kota Bekasi
- Kurangnya bangunan pengendali banjir
- Kurangnya jaringan bangunan silang (*Crossing/Syphon*) dan penampang basah yang terhambat jalan tol, Saluran Kalimalang, Rel kereta api
- Kurangnya tampungan air (Polder)

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- Sistem drainase yang berbatasan dengan wilayah pemerintahan lain (penyempitan/ *bottle neck*)
  - Berubahnya fungsi tata guna lahan (Land use)
  - Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan
  - Kurangnya staf ahli
- d. Bidang PJU dan taman
- Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
  - Hasil evaluasi dan pengendalian serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal.
  - Lambatnya laporan progres dari pejabat pelaksana teknis kegiatan.
  - Pemeliharaan fasilitas PJU dan taman belum maksimal

Perumusan isu-isu strategis didasarkan terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DBMSDA Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga pelaksana pembangunan. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis DBMSDA adalah:

- a. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran/drainase;
- b. Pembangunan polder sebagai mitigasi menangani banjir akibat kondisi topografi Kota Bekasi;
- c. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (taman).

## **2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR PD**

Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dari proses perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mendukung pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Akhir oleh Dinas BMSDA dilakukan sebagai upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Penjelasan tentang program/kegiatan didalam Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kota Bekasi**

Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	A	45.628.451.916	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	BB	35.326.292.860	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Bekasi	Persentase Polder dalam kondisi baik	2,24%	45.650.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Bekasi	Persentase Polder dalam kondisi baik	0,48%	98.430.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Bekasi	Persentase drainase dalam kondisi baik	0,32%	70.828.784.984	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Bekasi	Persentase drainase dalam kondisi baik	0,40%	89.500.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Bekasi	Persentase PJU dalam kondisi baik	1,61%	85.400.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Bekasi	Persentase PJU dalam kondisi baik	2,42%	84.200.000.000	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Bekasi	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	2,35%	61.939.414.380	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Bekasi	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	9,96%	118.150.000.000	
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	0,76%				Persentase jembatan dalam kondisi baik	1,05%		
			Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	1,67%				Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	0,39%		
6	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Bekasi	Presentase pengembangan jasa konstruksi dalam keadaan baik	100%	730.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Bekasi	Presentase pengembangan jasa konstruksi dalam keadaan baik	100%	730.000.000	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Bekasi	Persentase Reklame dalam kondisi baik	25%	3.805.441.720	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Bekasi	Persentase Reklame dalam kondisi baik	25%	3.812.000.000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Bekasi	Persentase Taman dalam kondisi baik	9,96%	22.017.907.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Bekasi	Persentase Taman dalam kondisi baik	15,25%	20.000.000.000	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pada tahun 2022 memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan PD terkait.

**Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Bekasi**

Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	A	Sekretariat
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Bekasi	Persentase Polder dalam kondisi baik	150.000 m3	Kepala Bidang SDA
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Bekasi	Persentase drainase dalam kondisi baik	40 km	Kepala Bidang SDA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kota Bekasi	Persentase PJU dalam kondisi baik	11251 titik	Kepala Bidang Prasarana Jalan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Bekasi	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100 km	Kepala Bidang Bina Marga
			Persentase jembatan dalam kondisi baik	0,03 km	Kepala Bidang Bina Marga
			Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	3 km	Kepala Bidang Bina Marga
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Bekasi	Persentase Reklame dalam kondisi baik	8 buah	Kepala Bidang Bina Marga
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Bekasi	Persentase Taman dalam kondisi baik	80348 m2	Kepala Bidang Prasarana Jalan

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## **BAB 2**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

##### **3.1.1 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026**

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepada Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) bahwa pada masa transisi bagi pemerintah daerah menjelang Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah segera Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 serta seluruh Kepala Daerah untuk Menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024 – 2026. Penentuan Tujuan dan Sasaran pada OPD memperhatikan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 -2026 serta norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun suatu periode pembangunan. Srdangkan sasaran penjabaran dari tujuan yang didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan keberhasilan tujuan dengn berupa hasil pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahapan strategis yang menjadi dasar perencanaan kinerja pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026 terdapat 5 tujuan yang diterjemahkan secara rinci ke

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dalam 11 sasaran. Tujuan RPD Kota Bekasi yang selaras dengan Tupoksi DBMSDA pada Tujuan Ketiga yaitu **“Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”** dengan sasaran adalah **“Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berwawasan Lingkungan”**.

Untuk mendukung tujuan dan sasaran tersebut, DBMSDA sesuai lingkup tugasnya yaitu membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DBMSDA Kota Bekasi mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan tujuan dan sasaran Daerah
- b. Merumuskan serta menetapkan rencana strategis kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang sumber daya air, bina marga, penerangan jalan umum, taman, dan jasa konstruksi.
- d. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sumber daya air, bina marga, penerangan jalan umum, taman, dan jasa konstruksi berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
- e. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi pelaksanaan di sumber daya air, bina marga, penerangan jalan umum, taman, dan jasa konstruksi.
- f. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya.

### **3.1.2 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kajian terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020-2024 terhadap Kota Bekasi sebagai berikut:

- a. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".
- b. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi :
  - Misi 3 yaitu Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
  - Misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c. Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi
  - Meningkatnya konektivitas jaringan jalan
  - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
  - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



- d. Prioritas Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Prioritas Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Program dan Kegiatan
- f. Melihat dan mengkaji program dan kegiatan Kementerian PUPR maka program yang terkait tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi antara lain:
- Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan: (2) Pengendalian Banjir, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantau; (3) Pengembangan Bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya; (5) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; dan (8) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi.
  - Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan: (3) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
  - Program Dukungan Manajemen: (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (25) Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD**

Renja merupakan pedoman perencanaan PD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan PD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala PD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra PD dan rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PD).

### 3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pada jangka waktu 1 (tahun) tahun mengikuti tujuan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2024 - 2026.

Tujuan DBMSDA Kota Bekasi adalah **Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati.**

### 3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 3 (tiga) tahun mendatang. Sasaran DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu: Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan.

## 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta menjalankan sasaran organisasi, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menetapkan program operasional dan kegiatan rutin Dinas yang ditetapkan pada tiap – tiap Bidang Dinas BMSDA sebagai berikut:

a. Sekretariat

Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasaran penunjang kinerja pembangunan Dinas Bina Marga

PARAF KOORDINASI:	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dilakukan program rutin yaitu program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan sebagainya.

b. Bidang Bina Marga

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan jaringan jalan yang ada telah dilakukan upaya – upaya yang dituangkan dalam bentuk kegiatan rutin tahunan dengan mempertimbangkan skala prioritas yaitu Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Berkalan jalan, Peningkatan Struktur Jalan Kota Bekasi, dan Pembangunan Jalan Baru, Pemeliharaan Berkala Jembatan, dan Pembangunan Jembatan Baru. Selain itu, kegiatan rutin dilakukan kepada pendukung jaringan jalan yaitu Pembangunan Pedestrian yang ramah disabilitas dan pemeliharaan reklame milik pemerintah kota.

c. Bidang Sumber Daya Air

Untuk melaksanakan penanganan banjir dan penyelenggaraan drainase kota telah dilakukan upaya – upaya yang dituangkan dalam bentuk kegiatan rutin tahunan dengan mempertimbangkan skala prioritas yaitu pematusan saluran oleh UPTD Pematusan dan Alat Berat, Pemeliharaan Rutin Saluran, Penyediaan Saranan Drainase Perkotaan dan Pembangunan Polder pada area – area rawan banjir.

d. Bidang Prasarana Jalan

Untuk memenuhi penerangan jalan umum Kota Bekasi dan ruang hijau kota telah dilakukan upaya – upaya yang dituangkan dalam bentuk kegiatan rutin tahunan dengan mempertimbangkan skala prioritas yaitu Pembangunan 1000 taman, Penyiraman taman – taman kota Bekasi secara berkala, penembangan pohon – pohon yang dapat membahayakan masyarakat terutama dimusim hujan, pembangunan dan pemeliharaan PJU, serta peningkatan lampu PJU dengan LED.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 3.1 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS BMSDA TAHUN 2024  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025  
KOTA BEKASI**

PERANGKAT DAERAH: DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	3	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			33.830.643.580				33.830.643.580	
1	3	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	3	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bekasi Timur	9 Laporan		APBD	9 Laporan		
1	3	02	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	02	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bekasi Timur	162 orang		APBD		162 orang	
1	3	02	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bekasi Timur	3 Laporan		APBD		3 Laporan	
1	3	02	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	3	02	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Bekasi Timur	1 paket		APBD		1 paket	
1	3	02	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Bekasi Timur	15 orang		APBD		15 orang	
1	3	02	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	3	02	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	1 Paket		APBD		1 Paket	
1	3	02	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	7 Paket		APBD		7 Paket	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	02	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bekasi Timur	3 paket		APBD		3 paket	
1	3	02	2	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bekasi Timur	12 Dokumen		APBD		12 Dokumen	
1	3	02	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bekasi Timur	60 Laporan		APBD		60 Laporan	
1	3	02	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Bekasi Timur	2241 Dokumen		APBD		2241 Dokumen	
1	3	02	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	3	02	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Bekasi Timur	6 unit				6 unit	
1	3	02	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Bekasi Timur	46 unit		APBD		46 unit	
1	3	02	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	3	02	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bekasi Timur	12 laporan		APBD		12 laporan	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	02	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bekasi Timur	12 laporan		APBD		12 laporan	
1	3	02	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	3	02	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bekasi Timur	6 Unit		APBD		6 Unit	
1	3	02	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bekasi Timur	83 Unit		APBD		83 Unit	
1	3	02	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bekasi Timur	108 unit		APBD		108 unit	
1	3	02	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bekasi Timur	2 unit		APBD		2 unit	
1	3	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR				83.500.000.000				83.500.000.000

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						(SDA)							
1	3	02	2	01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	3	02	2	01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Kota Bekasi	8 dokumen		APBD		8 dokumen
1	3	02	2	01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (km)	Kota Bekasi	2 km		APBD		2 km
1	3	02	2	01	11	Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (unit)	Kota Bekasi	1 unit		APBD		1 unit
1	3	02	2	01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Kota Bekasi	1 unit		APBD		1 unit
1	3	02	2	01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (unit)	Kota Bekasi	1 unit		APBD		1 unit
1	3	02	2	01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (km)	Kota Bekasi	1 km		APBD		1 km
1	3	02	2	01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	Kota Bekasi	16 unit		APBD		16 unit

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	





1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				94.416.505.499				94.416.505.499
1	03	07	2	01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								
1	03	07	2	01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (sistem jaringan)	Kota Bekasi	1 sistem jaringan		APBD		1 sistem jaringan	
1	03	07	2	01	02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (sistem Jaringan)	Kota Bekasi	1 sistem jaringan		APBD		1 sistem jaringan	
1	3	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				273.000.000.000				273.000.000.000
1	3	10	2	01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	Kota Bekasi	15 Dokumen		APBD		15 Dokumen	
1	3	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	Kota Bekasi	200 dokumen		APBD		200 dokumen	
1	3	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	Kota Bekasi	2 km		APBD		2 km	
1	3	10	2	01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur (KM)	Kota Bekasi	0,3 km		APBD		0,3 km	
1	3	10	2	01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)	Kota Bekasi	87 km		APBD		87 km	
1	3	10	2	01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	Kota Bekasi	3 km		APBD		3 km	
1	3	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)	Kota Bekasi	14,7 km		APBD		14,7 km	
1	3	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)	Kota Bekasi	2 km		APBD		2 km	
1	3	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Kota Bekasi	15 m		APBD		15 m	
1	3	10	2	01	17	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran (m)	Kota Bekasi			APBD			

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	10	2	01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang (m) Dilakukan Rehabilitasi	Kota Bekasi	30 m		APBD		30 m	
1	3	10	2	01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (m)	Kota Bekasi			APBD			
1	3	10	2	01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Kota Bekasi			APBD			
1	3	10	2	01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (dokumen)	Kota Bekasi	31 dokumen		APBD		31 dokumen	
1	03	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				730.000.000				730.000.000
1	3	11	2	01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								
1	3	12	2	01	02	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis (dokumen)	Kota Bekasi	12 dokumen		APBD		12 dokumen	
1	3	13	2	01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (orang)	Kota Bekasi	75 Orang		APBD		75 Orang	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

1	3	13	2	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
					Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (dokumen)	Kota Bekasi	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
					Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan (dokumen)	Kota Bekasi	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
					Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi (dokumen)	Kota Bekasi	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
					Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (dokumen)	Kota Bekasi	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
					Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi (dokumen)	Kota Bekasi	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				5.000.000.000				5.000.000.000
1	03	12	2	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang								

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

						Daerah Kabupaten/Kota							
1	03	12	2	04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (dokumen)	Kota Bekasi	8 dokumen		APBD		8 dokumen
2	11	04				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				21.000.000.000			22.200.000.000
2	11	04	2	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							
2	11	04	2	01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
2	11	04	2	01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	Kota Bekasi	15, 9102 ha		APBD		16, 9102 ha
2	11	04	2	01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (unit)	Kota Bekasi	48 unit		APBD		51 unit

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

### **BAB 3**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 merupakan suatu bentuk penjabaran dari Tujuan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 yang berdasarkan pada visi misi RPJPD, Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu startegis actual yang paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Selain itu program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 ini juga digunakan sebagai alat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah guna mendukung Tujuan Pembangunan Kota Bekasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dengan tupoksi yang melekat pada masing-masing PD di Kota Bekasi. Sehingga semua perangkat daerah dapat ambil bagian dalam mensukseskan visi pembangunan ini.

Relevansi DBMSDA terhadap tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan Kepala Daerah, dari 11 program prioritas terdapat 1 program prioritas Kepala Daerah yang merupakan tugas dari DBMSDA yaitu:

- Program 6 : Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR)

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Dinas BMSDA Tahun 2024 dapat dilihat terlampir pada Tabel 4.1.

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Program Pendanaan dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatof	Sumber Dana	Catatan Penting
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	9 Laporan	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	162 Orang	26.422.059.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	3 Laporan	2.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	3 Paket	639.294.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	115 Orang	294.990.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	1 Paket	25.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	8 Paket	450.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	3 paket	160.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	12 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	60 Laporan	125.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	2241 Dokumen	50.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	16 Unit	1.500.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	172unit	526.930.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	123 unit	880.418.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	12 laporan	66.111.500.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	12 laporan	2.575.580.720,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	6 Unit	423.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

**PARAF KOORDINASI:**

Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	208 Unit	1.525.500.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	103 unit	120.150.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi	2 unit	1.500.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>						
<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Kota Bekasi	5 dokumen	1.500.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (km)	Kota Bekasi	2,53 km	3.447.600.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

**PARAF KOORDINASI:**

Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pembangunan Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir (unit)	Kota Bekasi	2 Unit	175.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (unit)	Kota Bekasi	17 Unit	13.260.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (unit)	Kota Bekasi	5 unit	30.300.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (km)	Kota Bekasi	0,54 km	2.065.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>						
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun (dokumen)	Kota Bekasi	12 Dokumen	2.200.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (m)	Kota Bekasi	101 Sistem Drainase Perkotaan	22.155.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Bekasi	35 Sistem Drainase Perkotaan	37.919.374.602,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase)	Kota Bekasi	291 Sistem Drainase Perkotaan	51.922.178.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Kota Bekasi	3 unit	24.588.793.420,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikandan Dipelihara (m)	Kota Bekasi	13 Sistem Drainase Perkotaan	67.174.617.042,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>						
<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>						

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	Kota Bekasi	16 Dokumen	3.050.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kota Bekasi	214 KM	1.659.344.738,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Bekasi	5.27 KM	25.263.096.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Kota Bekasi	59.93 KM	84.102.184.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Bekasi	25.5 KM	29.741.085.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Bekasi	4,26 km	43.402.327.788,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Bekasi	17.88 km	81.377.373.569,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (jembatan)	Kota Bekasi	2 Jembatan	200.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (jembatan)	Kota Bekasi	9 Jembatan	2.237.072.800,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	kota bekasi	106 KM	794.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan kewenangan kabupaten/ kota dan desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	kota bekasi	106 KM	750.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>						
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>						

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	



Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	kota bekasi	12 dokumen	15.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	kota bekasi	103 Orang	515.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (dokumen)	kota bekasi	1 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>						

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (paket pekerjaan)	kota bekasi	1545 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>						
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (dokumen)	kota bekasi	8 dokumen	3.805.441.720,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>						
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	kota bekasi	5 dokumen	1.000.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	kota bekasi	48 Unit	27.916.372.373,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola (unit)	kota bekasi	48 unit	4.820.632.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>JUMLAH</b>				<b>622.344.780.314</b>		

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**BAB 4**  
**PENUTUP**

Renja Tahun 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2024. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2024 - 2026 (target di tahun 2024-nya). Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi pada tahun 2024, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

**KEPALA DINAS BINA MARGA  
DAN SUMBER DAYA AIR  
KOTA BEKASI**

  
**Drs. H. Abdullah, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630718 199601 1 001**

**PARAF KOORDINASI:**

Kepala DBMSDA	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	